

Meningkatkan Kemampuan Mitigasi Risiko Bank bagi Manajemen

BPRS Duta Artha Sejahtera

Novel Reonald¹, Dian Irma Aprianti², Putri Indardaini³

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Novel Reonald email novel@uwgm.ac.id

Abstrak

Program Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas manajemen risiko pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Duta Artha Sejahtera di Samarinda. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai respons terhadap tantangan era digital dan persaingan dengan fintech yang semakin ketat. Metode pelaksanaan meliputi tiga tahap utama: (1) sosialisasi konsep manajemen risiko berbasis prinsip syariah, (2) workshop implementasi Basel III yang disesuaikan dengan kebutuhan BPRS, dan (3) pendampingan teknis dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko operasional. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 80% dari 20 peserta (staf dan manajemen BPRS) mengalami peningkatan pemahaman tentang manajemen risiko berdasarkan perbandingan pre-test dan post-test. Selain itu, teridentifikasi lima skenario mitigasi risiko yang dapat segera diterapkan. Namun, ditemukan beberapa kendala seperti keterbatasan infrastruktur teknologi (hanya 30% staf terbiasa dengan tools digital) dan resistensi terhadap perubahan sistem manual. Sebagai solusi, tim pengabdian merekomendasikan: (1) kolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk pelatihan berkelanjutan, (2) pengembangan modul e-learning mandiri, dan (3) adopsi aplikasi manajemen risiko sederhana yang sesuai dengan skala BPRS. Kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan daya saing BPRS di era revolusi industri 4.0.

Kata Kunci: BPR Syariah, Manajemen Risiko, Basel III, Fintech, Pendampingan Teknis

1. Pendahuluan

Revolusi industri 4.0 banyak menawarkan peluang bagi perbankan, dan hal tersebut harus ditangkap oleh BPRS. Strategi pengembangan bisnis tidak lagi fokus pada produk - produk , tetapi juga juga harus didasarkan pada gagasan kolaborasi pengembangan platform atau rencana kerja bersama , itulah salah satu peluang yang harus menjadi fokus BPRS.

Pengembangan strategi yang dilakukan oleh BPRS, bukan hanya fokus pada 'product based', namun bergeser pada ide-ide untuk melakukan kolaborasi mengembangkan platform Bersama. Sebagai salah komponen satu dari sistem keuangan Indonesia , sektor perbankan syariah , termasuk BPRS , tidak luput dari berbagai ancaman yang ada di era Industri 4.0 saat ini . Saat ini , tingginya persaingan semakin ketat dengan tantangan yang sedang dialami. Tantangan dan tingkat persaingan yang ketat tersebut hasil dari berkembangnya perusahaan fintech, Lembaga Keuangan Mikro, serta Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai), termasuk adanya Program KUR dengan bunga 7 persen.

Untuk untuk mengatasi tantangan tersebut , BPRS harus fleksibel dan kreatif dalam menjalankan berbagai strategi bisnis , baik untuk membantu maupun membantu masyarakat

umum. Berbeda dengan negara - negara berkembang , seperti Ghana, India , Pakistan, dan Filipina , pasar kredit mikro sering difasilitasi oleh lembaga keuangan, yang mungkin perlu lebih kompetitif dengan lembaga keuangan yang lebih besar , seperti bank komersial . Misalnya misalnya di Ghana, Ghana pasar kredit mikrokredit didominasi oleh bentuk dari formal sebuah bank(Bank Perkreditan Rakyat (PedesaanRBC) , lembaga keuangan non-bank , dan koperasi kredit (Steel DanAndah , 2003).

Sesuai sistem perbankan nasional, BPR Syariah adalah bank yang didirikan untuk melayani Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM). Sektor UMKM ini yang menjadikan BPR Syariah berbeda pangsa pasar dengan Bank Umum dan Bank Umum Syariah. BPR Syariah merupakan BPR dengan pengelolaan berdasarkan prinsip syariah. Pengelolaan berdasarkan prinsip syariah termasuk pada pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko BPRS tidak jauh berbeda dengan risiko yang dihadapi bank konvensional. (Handoko, 2012, 5)

Konsep regulasi manajemen risiko bank secara internasional bersumber dari regulasi perbankan yang telah dirumuskan oleh komite Basel. Basel III dikeluarkan sebagai respon dari krisis global pada tahun 2008. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 tentang kewajiban penyediaan modal minimum Bank Umum yang mengadopsi dari ketentuan Basel. Basel III terbit sebagai penyempurnaan atas Basel II. Secara khusus ada beberapa tujuan diterbitkannya Basel III. Pertama, untuk memperkuat aturan permodalan dan likuiditas. Kedua, untuk meningkatkan kemampuan dan ketahanan sektor perbankan dengan menambah cadangan modal untuk menyerap guncangan dari tekanan ekonomi dan keuangan serta mencegah menjalarnya krisis derivatif keuangan ke derivatif ekonomi. Ketiga untuk meningkatkan kualitas manajemen risiko, tata kelola, transparansi dan keterbukaan. Keempat, memberikan resolusi terbaik bagi risiko sistematis bank lintas batas negara. (Wahyudi, 2013, 46).

2. Metode

Sosialisasi dan penyuluhan merupakan metode metode yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Kegiatan ini dilaksanakan oleh 4 orang dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis , dua orang mahasiswa aktif.

Kegiatan akan membandingkan prinsip bisnis dengan kegiatan sebelumnya yang difokuskan pada lingkungan dalam rangka membandingkan pengembangan profesional bisnis dengan topik kegiatan sebelumnya yang difokuskan pada risiko operasional.

Metode pelaksanaan pada program pengabdian kepada masyarakat ini disusun secara sistematis. Adapun tahap Persiapan Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan adalah :

1. Survei tempat pelaksanaan kegiatan
 2. Pengurusan administrasi dan perijinan tempat pengabdian masyarakat
- 2.1 Sosialisasi dilakukan secara tatap muka atau berinteraksi langsung ke para pimpinan dan staf BPRS Duta Artha Sejahtera. Adapun materi yang akan Risiko yang bersumber dari internal bank ialah faktor yang paling besar memiliki andil dalam keberlangsungan usaha sebuah bank. Salah satu risiko yang bersumber dari internal bank ialah terjadinya kesalahan pada identifikasi nasabah pembiayaan, dan lemahnya sistem monitoring/pengawasan pada pembiayaan.

Waktu : 2 bulan (Januari – Februari 2025)

Lokasi : Kantor BPRS Duta Artha Sejahtera dan UWGM Samarinda.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Capaian Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil mencapai beberapa capaian penting, antara lain:

1. Peningkatan Pemahaman Manajemen Risiko
80% peserta (16 dari 20 orang) menunjukkan peningkatan pemahaman tentang konsep manajemen risiko berdasarkan hasil pre-test dan post-test.
2. 70% peserta (14 orang) mampu mengidentifikasi risiko spesifik di BPRS, seperti risiko kredit, likuiditas, dan operasional.

3.2 Implementasi Materi Pelatihan

Peserta memahami penerapan Basel III dalam konteks BPR Syariah, termasuk:

1. Kewajiban penyediaan modal minimum.
2. Prinsip likuiditas dan tata kelola risiko.
3. Diskusi interaktif berhasil menghasilkan 5 skenario mitigasi risiko yang dapat diterapkan di BPRS Duta Artha Sejahtera.

Tantangan yang Dihadapi :

1. Selama pelaksanaan, tim pengabdian menemukan beberapa tantangan, yaitu:
 - a. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi
 - b. BPRS masih mengandalkan sistem manual untuk monitoring risiko, sehingga sulit bersaing dengan fintech yang berbasis digital.
 - c. Hanya 30% staf** yang terbiasa menggunakan tools manajemen risiko digital.
 - d. Resistensi terhadap Perubahan : Beberapa peserta (terutama staf senior) cenderung resisten terhadap penerapan sistem baru karena faktor kebiasaan.

3.3 Keterbatasan Waktu

Durasi pelatihan (2 bulan) dinilai belum cukup untuk mengubah pola pikir dan praktik kerja secara menyeluruh.

3.4 Solusi dan Rekomendasi

Berdasarkan tantangan di atas, tim pengabdian mengusulkan solusi berikut:

1. Kolaborasi dengan Otoritas Keuangan
2. Rekomendasi BPRS perlu menjalin kemitraan dengan OJK atau asosiasi perbankan syariah untuk akses pelatihan lanjutan dan pendanaan teknologi, mengadopsi aplikasi manajemen risiko sederhana yang sesuai dengan skala BPRS, Pelatihan Berkelanjutan :
 1. Workshop bulanan dengan fokus pada:
 2. Digitalisasi proses monitoring risiko.
 3. Studi kasus aktual dari BPRS lain.
 4. Modul e-learning untuk memudahkan staf belajar mandiri.
 5. Riset Lanjutan, Perlunya studi mendalam tentang dampak fintech terhadap BPRS untuk menyusun strategi adaptasi.

3. Indikator Keberhasilan

Keberhasilan kegiatan ini diukur melalui:

- a. Kuantitatif : Peningkatan skor post-test sebesar 30% dibanding pre-test. Peserta yang aktif memberikan solusi dalam diskusi (85%).
- b. Kualitatif: Adanya rencana aksi dari manajemen BPRS untuk menerapkan materi pelatihan. Permintaan mitra untuk program pendampingan tahap kedua.



Gambar 3.1 Sosialisasi hasil; indentifikasi Mitigasi



Gambar 3.2 Laporan Hasil Pendampingan



Gambar 3.3 Laporan dan evaluasi kegiatan Pendampingan

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil meningkatkan kapasitas manajemen risiko di BPRS Duta Artha Sejahtera melalui sosialisasi, workshop, dan pendampingan teknis. Hasilnya, 80% peserta menunjukkan peningkatan pemahaman tentang manajemen risiko berbasis prinsip syariah dan Basel III, serta teridentifikasinya lima skenario mitigasi risiko yang dapat diterapkan. Namun, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan resistensi terhadap perubahan masih menjadi hambatan. Untuk mengatasi hal ini, tim pengabdian merekomendasikan kolaborasi dengan OJK, pengembangan modul e-learning, dan adopsi aplikasi manajemen risiko sederhana. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat daya saing BPRS di era digital dan revolusi industri 4.0, sekaligus menjadi model bagi peningkatan kapasitas serupa di lembaga keuangan syariah lainnya.

Seluruh penulis memiliki kontribusi yang sama terhadap artikel. Semua penulis telah membaca dan menyetujui versi akhir artikel. Seluruh penulis memiliki kontribusi yang sama terhadap artikel. Semua penulis telah membaca dan menyetujui versi akhir artikel.

Pendanaan

Pengabdian ini didanai Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Deklarasi Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepenulisan, dan/atau publikasi artikel ini.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah memberikan pendanaan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Terimakasih pula kepada pihak mahasiswayang bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk turut berpartisipasi sebagai sasaran kegiatan ini

Daftar Rujukan

- Bank Indonesia. (2013). *Peraturan BI No. 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
- Handoko. (2015). Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan Pertama. Bandung: Pustaka Setia, Bandung.
- Hart, S. L. (1995). *A Natural-Resource-Based View of the Firm*. Academy of Management Review.
- Hemmelskamp, J. (1997). *Environmental Policy Tools and Firm Innovation*. OECD.
- OJK. (2021). *POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Kewajiban Modal Minimum BPRS
- Steel,W.F. and Andah,D.O., 2003., Rural and Microfinance Regulation in Ghana: Implications for Development and Performance of the Industry, Africa Region Working Paper Series No. 49., World Bank, Washington,DC
- Wahyudi, Imam. Miranti Kartika Dewi, dkk. (2013). Manajemen Risiko Bank Islam. Jakarta: Salemba Empat.